

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Arfan Ikhsan. 2011. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Armstrong, Michael and Baron, A. (1998). *Performance Management: The New Realities*. New York: Institute of Personnel and Development.
- Lunenburg, C. Fred. 2011. *Self-Efficacy in the Workplace: Implications for Motivation and Performance*. Sam Houston State University, International Journal Of Management, Business, and Administration. Vol. 14. Number 1, 2011.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2011. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Armstrong, Michael and Baron, A. (1998). *Performance Management: The New Realities*. New York: Institute of Personnel and Development.
- Rati Sumanti (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Di Aceh Melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)* Jurnal Borneo Administrator, 16 (2), 137-158. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>.
- Hesti Wira Meilan Wua, at.al.(2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Level Kapabilitas Berdasarkan Standar *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* pada APIP Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada Inspektorat Kota Manado dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", 11 (1), 2020.
- Nur Ain Zakiah Mohd Yusof, Hasnah Haron, Ishak Ismail, and Ong Hock Chye, (2019), "Independence of Internal Audit Unit Influence the Internal Audit Capability of Malaysian Public Sector Organizations" in *FGIC 2nd Conference on Governance and Integrity 2019*, KnE Social Sciences, pages 1230–1253. DOI 10.18502/kss.v3i22.5122.
- Nurdiana Mulyatini (2018). Model Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Di Jawa Barat. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi> Volume 5 Nomor 1 April 2018 P(*print*)-ISSN: 2355-6099, E(*online*)-ISSN : 2620-618.
- Dandy Evan Kiswara (2018). Meta Analisis: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Di Indonesia. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Article History Vol. 6 No. 1, Juli 2018, 54-66 Received May, 2018 EISSN:2548-9836.

Anggie Pramai Sella dan Dr. Lilik Purwanti, M.Si., CSRS., CSRA., Ak., CA (2019). Analisis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah Menggunakan *internal audit-capability model* (studi kasus pada inspektorat kabupaten sidoarjo). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Susan Rabbany Masdan, Ventje Ilat, Winston Pontoh.(2017). Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Jurnal riset akuntansi dan auditing "goodwill"

Busono, Pramadiyo (2017) *Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Malinau*. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Nita safitri, Abdul halim, (2017). Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang. Tesis MAKSI UGM tidak Dipublikasikan.

Bagus Kurnia Putra, Irwan Taufiq Ritonga, Analisis Perbandingan Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. Tesis UGM tidak dipublikasikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) tahun 2020-2024.

Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.

Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019.

Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327/1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 perihal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ/2022 perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.
- Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-101/D3/04/2022 perihal Suplemen Daftar Uji dan Bukti Pendukung Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- Surat Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Nomor B/1860/KSP.00/70-73/03/2022 tentang Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Inspektorat Kota Makassar.

Laporan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP
Nomor LP-35/LB/2020 tentang Laporan Kajian Pengukuran Kapabilitas
APIP.

Laporan Kinerja Nomor LKIN-2/K/SU/2022 tentang Laporan Kinerja BPKP
tahun 2021.

LAMPIRAN PERTANYAAN
YANG DIKEMBANGKAN UNTUK WAWANCARA MENDALAM

1. Apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan level kapabilitas APIP yang lebih tinggi sampai dengan level optimum?
2. Siapa saja yang harus berperan aktif dalam peningkatan level kapabilitas APIP?
3. Apakah pimpinan pemerintahan kota beserta jajaran terkait, mengetahui dan memahami tujuan peningkatan kapabilitas APIP?
4. Apakah terdapat regulasi yang ditetapkan pemerintah kota dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP dan bagaimana implementasinya?
5. Apa saja contoh konkret dukungan pimpinan dalam peningkatan kapabilitas APIP?
6. Indikator tata kelola Pemerintah Kota Makassar selama 3 tahun terakhir telah menunjukkan perbaikan, namun kenapa belum dapat mencapai kapabilitas APIP minimum yang ditargetkan dalam RPJM Nasional?
7. Apakah kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kota Makassar telah memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik?
8. Apakah dukungan sarana dan prasana Inspektorat Daerah Kota Makassar telah memadai?
9. Apakah persentase anggaran belanja daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar telah sesuai dengan regulasi?
10. Apakah pimpinan dan jajaran Inspektorat Daerah Kota Makassar telah memahami proses bisnis penilaian kapabilitas APIP?
11. Bagaimana hasil penilaian mandiri dan evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Makassar?
12. Dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan dalam 3 komponen yang terdiri dari 6 elemen dan 18 topik, apa saja kendala yang masih harus dipenuhi pada 18 topik tersebut?

13. Apa saja kendala dalam proses pemenuhan daftar uji dan bukti pendukung kapabilitas APIP?
14. Apa saja strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala peningkatan kapabilitas APIP pada 18 topik?
15. Apa saja strategi yang dilakukan dalam proses pemenuhan daftar uji dan bukti pendukung kapabilitas APIP?
16. Bagaimana keterkaitan hubungan antar 3 komponen kapabilitas APIP?
17. Apa saja area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar untuk lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pimpinan pemerintah kota?